

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH**

Ramdani Hidayatullah*, Risal, Rina Mayasafitri

Universitas Panca Bhakti

*Corresponding Author E-mail: ramdani.mobile@gmail.com

ABSTRACT

This research was motivated by indications of misappropriation of village funds managed by the village government, and followed up by BPK which turned out to be findings. There are several factors that cause this to happen, namely the lack of community involvement in the planning and monitoring process of village budgets, less than optimal institutions such as the BPD, limited competence of village heads and village officials, and the high political costs of village heads. The population in this research were villages in Mempawah Regency with a sampling technique using purposive sampling with a total sample of 45 villages. The variables in this research are village financial management as the dependent variable, while the independent variables are human resources, infrastructure, and external monitoring. The results showed that all independent variables had a positive effect on village financial management in Mempawah Regency.

Keywords: Human Resource, Infrastructure, External Monitoring, and Village Finance
Mangaement

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya indikasi penyelewengan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa, dan ditindaklanjuti oleh BPK yang ternyata menjadi temuan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi yaitu minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, kurang optimalnya lembaga-lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa, dan tingginya biaya politik kepala desa. Populasi dalam penelitian ini adalah desa-desa yang ada di Kabupaten Mempawah dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 45 desa. Variabel dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa sebagai variabel dependen, sedangkan untuk variabel independennya adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan pengawasan eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Mempawah.

Kata kunci: SDM, Sarana Prasarana, Pengawasan Eksternal, dan Pengelolaan Keuangan Desa

PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu tonggak utama dalam perwujudan perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah menjadikan desa sebagai pusat perhatian dan juga dijadikan pusat pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya di daerah pedesaan. Dalam hal ini desa mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat agar desa dapat bersaing dengan daerah yang ada dipertkotaan khususnya dibidang perekonomian, sehingga dibutuhkannya pengelolaan yang baik dari

aparatur pemerintah desa, sehingga apa yang diinginkan pemerintah dan masyarakat dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan-peraturan pendukungnya yang dapat memacu agar keuangan desa harus dikelola berdasarkan dengan asas transparansi, akntabilitas, partisipatif, dan harus dilakukan dengan tertib dan disiplin melalui pelaksanaan akuntansi desa. Dengan adanya otonomi daerah, maka didalam pengelolaan keuangan daerah khususnya di daerah pedesaan diperlukannya sumber daya manusia yang kompeten didalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, dibutuhkan juga sarana dan prasarana yang memadai untuk memudahkan para aparatur pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang baik harus diikuti dengan pengendalian secara intens yang dapat dilakukan oleh pihak eksternal dari pemerintah daerah yang berperan sebagai pengendali agar tidak terjadinya penyimpangan dan dapat mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang *good governance*.

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Mempawah yang mana terdapat sebanyak 60 desa yang ada di Kabupaten Mempawah. Dengan beragam sumber daya yang dimiliki oleh setiap desa. Di Kabupaten Mempawah masih terdapat beberapa desa yang masih terisolir dan masih jauh dari pengawasan pemerintah daerah, yang akan berdampak terjadinya penyimpangan didalam pengelolaan keuangan desa. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pengawasan eksternal terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Mempawah.

TINJAUAN PUSTAKA

Stewardship Theory

Teori yang menjadi dasar penelitian ini merupakan salah satu bagian dari teori agensi yaitu *stewardship theory*. *Stewardship theory* menjelaskan mengenai situasi yang mana para menejemen tidak termotivasi dengan tujuan individu melainkan termotivasi dengan kepentingan organisasi sebagai tujuan utamanya (Donaldson, 1991).

Implikasi *Stewardship theory* dalam penelitian ini adalah guna mendeskripsikan eksistensi pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik yang dapat dipercaya, menampung aspirasi masyarakatnya, memberikan pelayanan yang baik, dan dapat mempertanggung jawabkan apa yang diamanahkan kepadanya. Sehingga tujuan organisasi untuk mensejahterakan masyarakatnya dapat dicapai secara maksimal.

Good Governance

Menurut Rochman (2000) *governance* merupakan tata pemerintahan yang mengatur mekanisme dan pengelolaan sumber daya baik sumber daya ekonomi maupun sosial untuk mencapai pembangunan yang melibatkan pengaruh baik dari sektor pemerintah dan sektor non-pemerintah. Acuan dalam penerapan *Good Governance* yang dibuat oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2005), terdapat 7 asas diterapkannya *Good Governance* yaitu Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas Akuntabilitas, Asas Keterbukaan, Asas Porprosionalitas, dan Asas Profesionalitas.

Sumber Daya Manusia

Menurut Zuliarti (2012), kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Hal ini berarti

sumber daya manusi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmi (2018), Lisda (2018). bahwa kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Di dalam melakukan pengelolaan keuangan desa harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, dan memiliki pengalaman yang cukup didalam melakukan tugas dan fungsinya. Semakin baik kualitas sumber daya manusia yang dimiliki maka akan semakin baik pula pengelolaan keuangan desa tersebut.

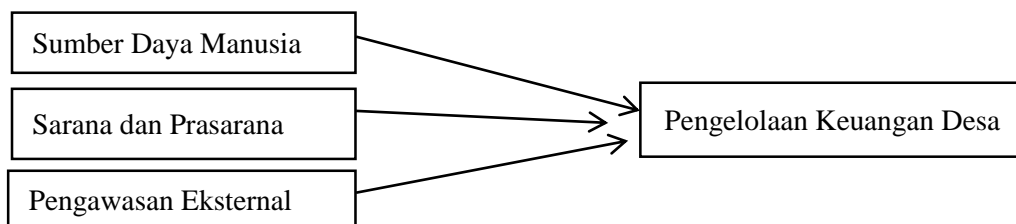
Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan pekerjaan baik itu peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Untuk menunjang kinerja dari aparatur desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat memudahkan para aparatur desa dalam melakukan pekerjaan. Dengan lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki akan mendukung kinerja dari aparatur desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan dari tahap perencanaan, pengelolaan, penatausahaan, sampai dengan pelaporan pertanggung jawaban.

Pengawasan Eksternal

Untuk mencapai hasil yang maksimal didalam mengelola keuangan desa pengawasan tidak bisa hanya dilakukan dengan pengawasan dari pihak intern itu sendiri melainkan perlunya adanya pengawasan dari pihak eksternal Menurut Baswir (2000) pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang berasal dari luar lingkungan organisasi. Dalam pengawasan eksternal ini, antara pengawas dan pihak yang diawasi tidak memiliki hubungan kedinasan. Di Indonesia, fungsi pengawasan eksternal diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan masyarakat secara langsung.

Adapun model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua desa yang ada di Kabupaten Mempawah berjumlah 60 desa. Dalam penentuan sampel digunakan metode *purposive sampling*. Metode ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya pertimbangan tertentu. Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai kantor desa yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan desa seperti kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa selaku aparatur desa yang mempunyai tugas sebagai pengambil keputusan, penatausahaan, dan mengurus seluruh administrasi yang ada di

dalam pengelolaan keuangan desa. Variabel independen pada penelitian ini adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan pengawasan eksternal. Sedangkan Variabel dependen adalah pengelolaan keuangan desa. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis regresi berganda berkaitan dengan variabel yang diuji tampak pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	9,720	2,698		3,603	0,001
1	Total (X.1)	0,254	0,075	0,281	3,374	0,001
	Total (X.2)	0,237	0,087	0,260	2,735	0,007
	Total (X.3)	0,259	0,066	0,343	3,935	0,000

Variabel Sumber Daya Manusia

Dari hasil uji t variabel X1 memperoleh nilai $0,001 < 0,05$ artinya bahwa variabel sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Dalam melakukan pengelolaan keuangan desa diperlukan Sumber Daya Manusia yang mendukung dan memadai sehingga apa yang di inginkan didalam pengelolaan keuangan desa dapat tercapai. Kemampuan Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh desa memang masih kurang memadai hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang masih rendah, dan disertai dengan kurangnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa. Namun dengan adanya pelatihan dan pendampingan yang diberikan sehingga mereka mampu menyesuaikan dan mengikuti arahan yang telah disampaikan. Dengan adanya peningkatan kapasitas Sumber daya manusia yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara pemberian pelatihan dan pendampingan pemerintah desa mampu menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan peraturan dan juknis yang diberikan, baik itu dari perencanaan, pelaksanaan, serta penatausahaan sampai dengan pelaporan yang tepat waktu.

Variabel Sarana dan Prasarana

Dari hasil uji t variabel X2 memiliki nilai signifikansi $0,007 < 0,05$ yang bermakna bahwa variabel sarana dan prasarana berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Sarana dan Prasarana merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk membantu manajemen didalam melakukan pengelolaan keuangan desa. sarana dan prasarana ini adalah salah satu elemen yang sangat penting didalam pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa yang ada di Kabupaten Mempawah sudah menggunakan teknologi informasi secara lengkap seperti komputer, internet, dan sistem aplikasi yang mendukung. Dengan lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah desa akan dapat meningkatkan kinerja aparatur desa itu sendiri yang dapat terbantu dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Dalam melakukan pengelolaan keuangan pemerintah desa sudah menggunakan sistem aplikasi yang sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Mempawah. Adanya aplikasi ini pemerintah desa

lebih dimudahkan di dalam melakukan pengelolaan keuangan desa sampai dengan pelaporan hasil pekerjaan selama setahun yang telah dilakukan secara tepat waktu.

Variabel Pengawasan Eksternal

Hasil uji t variabel X3 menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti variabel pengawasan eksternal berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Pengawasan ini terlebih dahulu dilakukan oleh inspektorat kabupaten untuk meminimalisir temuan jika terdapat kekeliruan, sehingga hal ini menjadi bahan evaluasi pemerintah desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan lebih baik. Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (BPKP) merupakan lembaga yang bertugas untuk mengawasi kinerja keuangan pemerintah yang salah satunya pemerintah desa. BPKP rutin melakukan pemeriksaan setiap tahunnya pada pemerintah desa. Hal ini bertujuan untuk mencari kelemahan dan kekurangan terhadap peraturan dan sistem yang berlaku. Dengan adanya pemeriksaan dan ditemukan kelemahan dan kekurangan yang ada agar dapat dijadikan bahan evaluasi BPKP untuk melakukan pengkajian tentang peraturan-peraturan dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan desa. Dengan adanya penyesuaian sistem yang ada akan memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.

Aplikasi SIKEUDES yang dirancang oleh BPKP bertujuan untuk mempermudah didalam pemeriksaan walaupun sistem aplikasi yang dimiliki masih bersifat offline. Hal ini menjadi koreksi pihak BPKP agar dapat meningkatkan sistem aplikasi yang sebelumnya offline menjadi online. Dengan adanya peningkatan sistem yang telah dilakukan akan mempermudah BPKP untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa yang sudah berbasis aplikasi. Selain BPKP, masyarakat juga dapat menjadi pengawas eksternal yang secara langsung dapat memantau kegiatan yang dilakukan aparatur desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah daerah kabupaten dalam mengawasi kinerja dari aparatur desa.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Mempawah.
2. Sarana dan prasarana berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Mempawah.
3. Pengawasan eksternal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Mempawah.
4. Sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan pengawasan eksternal secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Mempawah.

Saran

1. Diharapkan pemerintah desa di Kabupaten Mempawah dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang ada di kantor desa, baik itu dari segi kualitas

ataupun kuantitas pegawai yang ada, sehingga didalam pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik.

2. Sarana dan prasarana yang telah tersedia di pemerintah desa di Kabupaten Mempawah diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik dengan adanya aplikasi Siskeudes yang dapat membantu dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten agar dapat lebih intensif didalam melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap paratur desa di dalam melakukan pengelolaan keuangan desa sehingga apa yang telah direncanakan dapat terealisasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Abdi, Muhammad Wahib dan H. Cahyono. 2015. Analisis Kesiapan Desa Blawi Dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal*, pp. 5-7. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.
- Akang, Akasius. 2015. Kesiapan Pemerintah Desa Landungsari Dalam Menghadapi Implementasi Alokasi Dana Desa sesuai UU No. 6 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, pp. 140-143. FISIP Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.
- Anwar, Misbahul dan B. Jatmiko. 2012. Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta) [Jurnal Online] (diupdate 2012) Tersedia di: http://upy.ac.id/ekonomi/files/vol11/BAB_I_HAL.pdf
- Sanjaya. 2017. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Soppeng). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Arikunto, Suharismi. 2006. *Prosedur Penelitian*. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Selemba Empat : Jakarta.
- Bastian, Indra. 2014. *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. Selemba Empat : Jakarta
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Undip.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Selemba Empat : Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Selemba Empat : Jakarta.
- <http://www.bpkp.go.id/maluku/konten/2116/PERATURAN-KEUANGAN-DAERAH>
- <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_manusia
- Lisda, Ruslina. 2018. Pengaruh Implementasi SIMDA Desa, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
- Nordian, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 72 Tahun 2005.
- Pramawati, Ayudyah. 2014. Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Rahmi, Nuraida. 2018. Analisis Pengaruh Pengawasan Internal dan Kapasitas SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Rahmawati, Irna. 2015. Analisis kesiapan desa dalam implementasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Sapto dkk. 2016. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Lombok Tengah. Universitas Taruma Negara. Jakarta.

Tanjung, Hafiz, Abdul. Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPD. Selemba empat : Jakarta.

www.suarapemredkalbar.com

Zuliarti. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Internal Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi pada Pemerintah Kabupaten Kudus.